

IMPLEMENTASI RUMAH DATAKU SEBAGAI BASIS DATA DAN INFORMASI DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

Anjania Rayi Saputri¹

Magister Ilmu Pemerintahan, STPMD “APMD”

Email: anjania.rayi@gmail.com

ABSTRACT

Rumah DataKu is a strategic effort to provide community-based population data at the village level to support more participatory and evidence-based development planning. Although the program design has been normatively supported by national policies, its implementation in the field still shows significant variations. This study aims to evaluate the implementation of Rumah DataKu in Tileng Village, Gunungkidul through the Edward III implementation theory approach and compare it with practices in various other regions to identify challenges and opportunities for its development. This study uses a qualitative method with a literature study approach. Data were obtained from scientific articles, research reports, and relevant policy documents published between 2020 and 2025. The analysis was carried out descriptively and comparatively by placing Tileng as the main case study. The results show that the implementation of Rumah DataKu in Tileng has met the four main components of Edward III's theory: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. However, community participation and data literacy are not optimal. Comparison with other regions reveals that the success of implementation is greatly influenced by human resource support, continuity of training, and cross-sector partnerships. Areas such as Kalidoni, Batang Hari, and Salatiga show good practices, while Sidoarjo and Pandeglang face systemic and participatory barriers. The conclusion of this study highlights the importance of active community involvement and empowerment approaches in supporting the successful implementation of Rumah DataKu. Sustainable strategies are needed in the form of strengthening the capacity of cadres, developing inclusive digital platforms, and replication of best practices between regions to realize accurate, relevant, and transformative village data.

Keywords: data, my data house, KB Village

ABSTRAK

Rumah DataKu hadir sebagai upaya strategis dalam penyediaan data kependudukan berbasis masyarakat di tingkat desa guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis bukti. Meskipun secara normatif desain program telah didukung oleh kebijakan nasional, implementasinya di lapangan masih menunjukkan variasi yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Rumah DataKu di Kalurahan Tileng, Gunungkidul melalui pendekatan teori implementasi Edward III serta membandingkannya dengan praktik di berbagai daerah lain guna mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dan dipublikasikan antara tahun 2020 hingga 2025. Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif dengan menempatkan Tileng sebagai studi kasus utama. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan Rumah DataKu di Tileng telah memenuhi empat komponen utama teori Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Namun, partisipasi masyarakat dan literasi data belum optimal. Perbandingan dengan daerah lain mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya manusia, kesinambungan pelatihan, serta kemitraan lintas sektor. Daerah seperti Kalidoni, Batang Hari, dan Salatiga menampilkan praktik baik, sedangkan Sidoarjo dan Pandeglang menghadapi hambatan sistemik dan partisipatif. Kesimpulan penelitian ini menyoroti pentingnya pelibatan aktif masyarakat dan pendekatan pemberdayaan dalam mendukung keberhasilan implementasi Rumah DataKu. Diperlukan strategi berkelanjutan berupa

penguatan kapasitas kader, pengembangan platform digital yang inklusif, serta replikasi praktik terbaik antarwilayah untuk mewujudkan data desa yang akurat, relevan, dan transformatif.

Kata kunci: data, rumah dataku, kampung KB

A. PENDAHULUAN

Isu kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data serta informasi terkait kependudukan dan keluarga sebagai bagian dari pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan (Kustanto et al., 2020)

Mengacu pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, setiap warga negara memiliki hak untuk turut berperan dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Partisipasi ini dapat diwujudkan baik secara individu maupun melalui peran aktif lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, serta sektor swasta (BKKBN, 2018)

Ketersediaan data dan indikator pembangunan yang mutakhir, valid, dan dapat dipercaya menjadi kebutuhan esensial untuk mendukung pelaksanaan intervensi pembangunan di semua tingkat wilayah. Pada tingkat agregat, pelaksanaan desentralisasi berperan penting dalam memperkuat proses perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom-up* (BKKBN, 2020)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan perencanaan pembangunan serta menentukan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Selain itu, melalui kebijakan dana desa, pemerintah desa juga memperoleh otonomi yang signifikan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan di tingkat lokal.

Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga yang disebut Rumah DataKu merupakan wadah kegiatan masyarakat yang berperan sebagai pusat penyedia data dan informasi kependudukan pada tingkat mikro. Keberadaannya menjadi sangat strategis dalam menjawab kebutuhan data yang akurat untuk perencanaan dan implementasi program pembangunan. Oleh karena itu, pendirian Rumah Data di setiap desa menjadi penting guna menjamin ketersediaan data yang relevan dan berkualitas. Lebih lanjut, pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data di Rumah Data Kependudukan tidak hanya mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya data kependudukan dalam pembangunan, tetapi juga menghasilkan data yang merefleksikan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara lebih representative (BKKBN, 2018)

Pada tahun 2017, BKKBN memperkenalkan Rumah Data Kependudukan sebagai pusat basis data dan informasi sekaligus titik intervensi pembangunan di tingkat mikro, khususnya di wilayah Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dalam mendampingi serta membina masyarakat dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta sektor pembangunan lainnya. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang berwawasan kependudukan, serta mendorong kepemilikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan (Yustini et al., 2024)

Dalam era pembangunan berbasis data, Rumah DataKu sebagai inovasi pengelolaan data di tingkat lokal berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Kalurahan Tileng, Gunungkidul, telah menjadi salah satu pelopor implementasi Rumah DataKu yang mendapat perhatian dalam penelitian Hanifah & Samsuharjo (2024). Penelitian ini telah memberikan kontribusi penting dengan menganalisis implementasi Rumah DataKu di Kalurahan Tileng menggunakan kerangka teori Edward III. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah memenuhi keempat indikator utama teori tersebut. Namun, kajian tersebut masih bersifat deskriptif yang terbatas pada konteks lokal Tileng dan lebih menitikberatkan pada aspek bagaimana kebijakan diimplementasikan secara umum.

Selain itu, penelitian tersebut belum melakukan perbandingan analitis dengan literatur dari daerah lain yang menerapkan Rumah DataKu, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konteks implementasi yang lebih luas. Beberapa studi di daerah lain mengindikasikan bahwa keberhasilan Rumah DataKu sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan dukungan sumber daya, peran aktif masyarakat dalam literasi data, serta kolaborasi multi-aktor yang berkelanjutan. Dengan demikian, terdapat gap yang signifikan antara pendekatan normatif yang mengacu pada teori Edward III dengan realitas praktik yang dinamis dan kompleks di lapangan. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menambahkan dimensi keberlanjutan dan partisipasi masyarakat, serta melakukan telaah komparatif lintas daerah.

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas bagaimana perbandingan implementasi Rumah DataKu di Tileng dengan literatur dari daerah lain terkait aspek keberlanjutan, partisipasi, dan literasi data? Apa saja tantangan struktural dan peluang pengembangan implementasi Rumah DataKu berdasarkan telaah lintas daerah? Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk memperluas kajian dengan mengkaji implementasi Rumah DataKu di Tileng melalui pendekatan kritis berbasis teori Edward III, serta membandingkannya dengan literatur dari daerah lain di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam implementasi Rumah DataKu serta aspek keberlanjutan dan partisipasi masyarakat yang selama ini kurang terungkap.

B. KERANGKA TEORI ATAU KONSEP

Struktur Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga/Rumah DataKu terdiri dari: Ketua dan Kader dengan jumlah 2 orang atau disesuaikan dengan kompleksitas pada Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (luas wilayah, jumlah penduduk, jenis data yang dikelola, dan sebagainya) (BKKBN, 2020)

Kegiatan pokok Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga/Rumah DataKu meliputi 4 hal yaitu pengumpulan dan *updating* data, pengolahan data, analisis data, dan penyajian data ditingkat desa/kelurahan. Desa/Kelurahan merupakan *Stakeholder* yang bekerja langsung di lapangan dalam proses pengumpulan data dan analisis kependudukan, yang terdiri dari: Pengurus Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga sebagai pelaksana, dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai mitra utama Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga.

Selain pemerintah desa/kelurahan, tenaga penyuluh lapangan seperti Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Keluarga Harapan serta kader-kader kelompok kegiatan berbasis masyarakat lainnya seperti PAUD, Posyandu, Posbindu, Pengelola Data tingkat Desa lainnya juga merupakan mitra utama bagi keberlangsungan kegiatan pada Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga. *Stakeholder* pada level desa/kelurahan sebagai pelaksana langsung kegiatan dan program Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga,

fungsi yang dilaksanakan adalah fungsi operasional. Orientasi utama pada *stakeholder* ini adalah memastikan pelaksanaan program pendataan dapat berjalan dengan efektif, serta menghasilkan data kependudukan dan informasi keluarga yang memiliki presisi maksimal.

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan pengertian secara umum, Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang, cermat dan terperinci, jadi implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.

Menurut Van Meter & Van Horn (1975) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Meter & Horn, 1975)

Teori implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dikembangkan dan diteoremdkan oleh Edward III (1980), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. (Jumroh & Pratama, 2021)

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif antara perumus dan pelaksana kebijakan sangat penting untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap maksud, tujuan, dan prosedur kebijakan. Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman, resistensi, bahkan kegagalan implementasi. Komunikasi tidak hanya menyangkut penyampaian informasi, tetapi juga kejelasan, konsistensi, dan frekuensi interaksi antar aktor kebijakan.

2. Sumber daya

Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya. Ini mencakup anggaran, personel, waktu, teknologi, dan informasi. Keterbatasan sumber daya sering kali menjadi faktor utama penyebab gagalnya implementasi di banyak daerah. Sumber daya yang cukup menjadi prasyarat agar pelaksana mampu menjalankan tugasnya secara optimal sesuai perintah kebijakan.

3. Sikap Pelaksana

Sikap atau disposisi pelaksana kebijakan merujuk pada tingkat penerimaan, pemahaman, dan komitmen terhadap kebijakan. Bila pelaksana tidak setuju atau tidak memahami isi kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Faktor ini mencerminkan bahwa implementasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan ideologis pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang terlalu birokratis, tidak fleksibel, atau tumpang tindih dapat menghambat kelancaran implementasi. Sebaliknya, struktur yang jelas dengan pembagian tugas dan koordinasi yang baik, akan mendukung efektivitas implementasi. Struktur organisasi menentukan sejauh mana wewenang, tanggung jawab, dan prosedur pelaksanaan dapat dijalankan secara efisien.

Model yang sering disebut sebagai Edward III dalam beberapa literatur Indonesia, pada dasarnya merujuk pada model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter & Van Horn (1975).

Pemerintahan yang bersifat egaliter tercermin dari keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, karena partisipasi ini mampu menyelaraskan arah

kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat. Keterlibatan warga desa menjadi sangat penting dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan pembangunan desa, mulai dari identifikasi permasalahan, perumusan program kerja, hingga pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Warga desa sendiri memiliki kekayaan modal sosial yang telah terbangun secara turun-temurun dan menjadi bagian dari tradisi kolektif, yang dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Baru et al., 2019)

Menurut Tjokromidjojo (1998), sebagaimana dikutip dalam (Yustiyanto, 2025), partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahapan utama. Pertama, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan. Kedua, partisipasi dalam memikul tanggung jawab serta menunjukkan akuntabilitas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Ketiga, keterlibatan dalam pemilihan serta pemanfaatan hasil pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

C. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Metode Penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data berupa artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait Rumah DataKu dan teori implementasi kebijakan. Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif dan kritis, menempatkan studi Rumah DataKu Kalurahan Tileng Gunungkidul sebagai kasus utama dan membandingkannya dengan literatur daerah lain. Peneliti Menelaah dan membandingkan isi, tema, dan temuan dari jurnal-jurnal sebelumnya. Literatur dipilih berdasarkan relevansi topik, tahun publikasi (2020–2025) dan keterkaitannya dengan variabel implementasi serta partisipasi masyarakat dalam program Rumah DataKu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Menurut (Hanifah & Samsuharjo, 2024) dalam tulisannya yang Berjudul “Implementasi Program Rumah Data Kependudukan Dalam Meningkatkan Pengelolaan Data Di Level Mikro” menunjukkan implementasi program Rumah DataKu (RDK) di Kampung KB Teratai, Kalurahan Tileng, memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan pengelolaan data kependudukan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan.

a). Aspek komunikasi awal dalam pelaksanaan program dinilai sudah cukup baik. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat telah menunjukkan koordinasi yang solid. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat juga telah dilaksanakan, meskipun cakupannya belum merata. Sebagian masyarakat Kalurahan Tileng masih belum mengetahui keberadaan program RDK, yang menunjukkan perlunya penguatan strategi komunikasi.

b). Aspek sumber daya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia di Kalurahan Tileng masih belum optimal beberapa kader masih merangkap jabatan. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran menjadi hambatan signifikan dalam mendukung sarana, prasarana, serta keberlanjutan operasional program. Meskipun demikian, upaya alternatif terus diupayakan oleh pihak pelaksana guna menutupi keterbatasan tersebut misalnya dengan didukung oleh kombinasi sumber: APBDes, swadaya, dan dukungan Kapanewon.

c). Dalam aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program. Setiap aktor yang terlibat menjalankan tugasnya dengan kesungguhan untuk mencapai tujuan program dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

d). Pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah didukung oleh keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan struktur organisasi formal yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK). Hal ini memastikan setiap kader Rumah DataKu memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga koordinasi dan pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan terarah.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung implementasi program, antara lain adanya inovasi baru melalui program RDK, pembaruan data secara rutin, penyediaan papan display data yang informatif, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, kemitraan lintas sektor, serta komitmen terhadap kerahasiaan data. Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat, yang terdiri atas kendala internal seperti keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran yang minim, serta kurang maksimalnya sosialisasi. Sedangkan secara eksternal, tantangan muncul dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan pemanfaatan data kependudukan.

Menurut (Kustanto et al., 2020) dalam tulisannya yang berjudul “Tantangan Pengembangan Rumah Data Kependudukan Di Kabupaten Sidoarjo” menunjukkan bahwa kondisi eksisting Rumah Dataku di Kabupaten Sidoarjo masih belum memenuhi ekspektasi sebagai komponen utama dalam mendukung implementasi Kampung KB. Dari total 42 Kampung KB yang telah terbentuk, hanya 3 yang memiliki Rumah Dataku, yang berarti hanya sekitar 7% yang telah memenuhi syarat ketersediaan basis data kependudukan.

Hal ini menunjukkan ketimpangan antara kuantitas Kampung KB dan dukungan infrastruktur datanya. Dari sisi pengelolaan, kinerja Rumah Dataku dinilai belum optimal, baik dalam aspek penyediaan, penyajian, maupun pembaruan data. Pengembangan Rumah Dataku di Kabupaten Sidoarjo menghadapi berbagai tantangan, secara internal keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, serta kurangnya sarana dan prasarana menjadi hambatan utama. Sementara itu, tantangan eksternal meliputi lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan, serta kurangnya partisipasi aktif dari warga dalam pengelolaan dan pemanfaatan data.

Menurut (Fuady, 2020a) dalam tulisannya yang berjudul “Kepengurusan Menentukan Kegiatan (Kasus Pendampingan Rumah Dataku Pada Kampung KB Di Kampung KB Di Dusun Geguntur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram)” bahwa Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Dusun Geguntur, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, termasuk salah satu kampung yang menunjukkan tingkat keaktifan tinggi dibandingkan dengan Kampung KB lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran kepengurusan Kampung KB yang solid, aktif, dan berkomitmen dalam menjalankan berbagai kegiatan.

Hampir seluruh komponen program Kampung KB telah terlaksana dengan baik. Meskipun Rumah DataKu di lokasi tersebut belum memiliki sekretariat yang memadai, kegiatan pendataan tetap berjalan melalui metode manual. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Salah satu upaya strategis yang disarankan adalah penyediaan perangkat pendukung seperti laptop, guna mendukung implementasi hasil pelatihan dan memungkinkan pengurus Rumah DataKu untuk secara langsung mengoperasikan sistem pengelolaan data secara digital.

Menurut (Fuady, 2020b) dalam tulisannya yang berjudul “Rumah Dataku: Antara Harapan Dan Kenyataan Di Kampung KB (Kasus Pendampingan Rumah Dataku Pada Kampung KB Di Kampung KB Dusun Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)” bahwa keberadaan Rumah Dataku di Kampung KB Pengempel

Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram masih belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Proses pendampingan di lokasi tersebut perlu terus dilanjutkan agar penguatan kapasitas pengelola dapat berlangsung secara berkelanjutan. Salah satu kebutuhan mendesak adalah penyediaan perangkat pendukung seperti laptop, yang berfungsi untuk mengoperasikan hasil pelatihan secara langsung oleh pengurus Rumah Dataku. Di samping itu, keberadaan sekretariat menjadi hal yang esensial guna mendukung kelancaran seluruh aktivitas pendataan, mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data kependudukan.

Menurut (Ari et al., 2021) dalam tulisannya yang berjudul “Pendampingan Pembenahan dan Pengelolaan Rumah Dataku dan Informasi Keluarga Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kelurahan Kauman Kidul Salatiga” bahwa kegiatan pengabdian dan pemberdayaan yang dilaksanakan di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Teratai Kelurahan Kauman Kidul Kota Salatiga, telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas pengurus Kampung KB serta pengelola Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu). Melalui kegiatan seperti penyusunan format variabel data, pelatihan input data, serta pelaksanaan verifikasi dan pengarsipan, para pengurus memperoleh wadah untuk bekerja secara kolaboratif dan terstruktur dalam pengelolaan data kependudukan.

Penerapan sistem digital dalam proses penginputan data memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi yang tersedia secara lebih terorganisir, sekaligus meminimalisir risiko kehilangan atau tercecernya data. Selain itu, kehadiran Rumah DataKu memberikan akses publik terhadap gambaran umum kondisi demografi serta persebaran penduduk di wilayah Kelurahan Kauman Kidul. Rumah Data ini juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara BKKBN dan pemerintah kelurahan dalam rangka pelaksanaan sensus penduduk dan pengumpulan data yang lebih akurat, termasuk dalam mengidentifikasi isu-isu lokal melalui papan permasalahan yang tersedia.

Dari sisi promosi dan edukasi, pengembangan media seperti video profil Kampung KB dan akun media sosial telah berkontribusi dalam memperkenalkan potensi wisata, baik alam maupun sejarah, yang dimiliki Kelurahan Kauman Kidul kepada masyarakat luas. Hal ini berpotensi mendorong peningkatan kunjungan wisata dan berdampak positif terhadap perekonomian lokal.

Selain itu, keberadaan pojok baca dalam Rumah Data turut memperluas akses pengetahuan masyarakat dan memperkuat dukungan terhadap pengembangan sektor pendidikan di wilayah tersebut. Keseluruhan kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendorong peningkatan status Kampung KB Teratai menjadi Kampung KB Paripurna. Upaya tersebut sejalan dengan pencapaian yang telah diraih, yaitu sebagai Kampung KB percontohan tingkat Kota Salatiga atau *center of excellence*, yang diharapkan dapat menjadi model replikasi bagi wilayah lainnya.

Menurut (Lumendek et al., 2021) dalam tulisannya yang berjudul “Pendampingan Masyarakat dalam Meningkatkan UMKM dan Pembenahan Sarana Adminisratif Rumah Dataku di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Melati Kelurahan Blotongan Kota Salatiga” yaitu penyelesaian pembenahan Rumah DataKu di Kelurahan Blotongan telah menghasilkan sebuah pusat informasi yang memuat data kependudukan dan informasi keluarga secara lengkap dan informatif. Keberadaan Rumah DataKu ini dapat dimanfaatkan sebagai *basedata* atau basis data utama bagi pemerintah kelurahan dalam merumuskan program-program pembangunan ke depan secara lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Kampung KB “Melati” di Kelurahan Blotongan Kota Salatiga juga menunjukkan karakter integratif, sinergis, dan melibatkan berbagai sektor (*lintas sektoral*) dalam pelaksanaannya, sehingga berpotensi besar menjadi model pengembangan kampung berkualitas yang holistik dan berkelanjutan.

Menurut (Purnomo et al., 2022) dalam tulisannya yang berjudul “Pendampingan dan Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga di Kampung KB Akrab Kelurahan Tingkir Lor Kota Salatiga Tahun 2022” dalam konteks otonomi daerah, penguatan kembali peran pembangunan kependudukan menjadi tantangan tersendiri, terutama karena aspek pengendalian penduduk cenderung terabaikan sejak era reformasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu gerakan strategis yang mampu menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wawasan kependudukan. Salah satu program yang diinisiasi dalam rangka menjawab tantangan tersebut adalah pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di setiap kecamatan di seluruh Indonesia, termasuk di Kelurahan Tingkir Lor, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kerangka ini, Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga, atau yang dikenal dengan Rumah DataKu, berperan penting sebagai pusat pengelolaan data dan informasi, sarana intervensi terhadap permasalahan kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga, sekaligus sebagai media integrasi berbagai kegiatan di Kampung KB. Menyadari pentingnya peran tersebut, mahasiswa peserta Kuliah Praktik Kelembagaan yang ditempatkan di Kelurahan Tingkir Lor menginisiasi program pemutakhiran data kependudukan. Skala cakupan data yang semula terbatas pada tingkat RW telah berhasil diperluas hingga tingkat kelurahan, sesuai dengan klasifikasi ideal. Melalui kegiatan pendampingan dan proses input data, diharapkan pembaruan informasi dalam Rumah DataKu dapat berlangsung secara berkala dan berkelanjutan.

Menurut (Fuadi et al., 2023) dalam tulisannya yang berjudul “Menuju Kampung Berkualitas (Pendampingan Rumah DataKu Pada Kampung KB Di Dusun Geguntur Kelurahan Jemping Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram)” bahwa lingkungan Geguntur merupakan salah satu dari sebelas lingkungan yang berada di wilayah Kelurahan Jemping Baru. Sejak ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) pada 23 Maret 2016, berbagai kegiatan yang dirancang dalam program Kampung KB telah berhasil direalisasikan, kecuali pengembangan Rumah DataKu yang belum optimal. Untuk mendukung penguatan fungsi Rumah DataKu, pelatihan telah diselenggarakan dengan fokus pada tiga materi utama, yaitu Acuan Replikasi Rumah DataKu, Pelatihan penggunaan Program Excel, dan Pengenalan Program DEVInfo.

Sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Berkualitas, pendekatan pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada aspek kuantitatif, tetapi juga mencakup dimensi kualitatif berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan program pun diperluas dari tingkat kampung/lingkungan menjadi tingkat desa/kelurahan, sehingga menuntut koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang lebih intensif.

Dalam konteks ini, pengelolaan Rumah DataKu yang kini berada pada level desa/kelurahan memiliki potensi strategis untuk menyediakan data yang lebih komprehensif dan relevan dalam mendukung perencanaan pembangunan. Namun demikian, transformasi dari Kampung KB menjadi Kampung Berkualitas tidak dapat tercapai tanpa dukungan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2022.

Menurut (Allyreza et al., 2023) dalam tulisannya yang berjudul “Pendampingan Kader Keluarga Berencana Dalam Pengisian Aplikasi Rumah DataKu Sebagai Upaya

Mewujudkan Kampung KB Berkualitas Di Desa Pasir Panjang Kabupaten Pandeglang” menunjukkan pentingnya kegiatan sosialisasi mengenai keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Pandeglang, dilanjutkan dengan pelatihan serta pendampingan pengisian data pada aplikasi Rumah DataKu. Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, sejumlah kendala utama dihadapi, antara lain tidak stabilnya koneksi internet yang menghambat proses unggah data, serta ketidaklengkapan dokumen kependudukan yang dibutuhkan dalam aplikasi. Kendala lainnya berkaitan dengan keterbatasan anggaran.

Pemerintah Desa Pasir Panjang belum mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan survei data kependudukan, karena adanya persepsi bahwa pengelolaan dan penyediaan data tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Di samping itu, kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan, di mana jumlah kader KB masih terbatas dan sebagian besar belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan teknis yang memadai, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami tata cara penginputan data pada aplikasi Rumah DataKu.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan ini diperlukan intervensi yang lebih intensif dari BKKBN atau Penyuluh KB di Kabupaten Pandeglang khususnya Desa Pasir Panjang, termasuk keterlibatan aktif kader KB di tingkat kecamatan untuk melakukan pemantauan dan pendampingan teknis secara berkala. Kolaborasi yang sinergis antara BKKBN, pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta juga menjadi krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi program Kampung KB Berkualitas serta ketersediaan data kependudukan yang lengkap dan valid.

Keberadaan data yang akurat dalam aplikasi Rumah DataKu sangat penting sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan desa. Data ini akan membantu menghasilkan kebijakan dan program yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Dengan demikian, penguatan kapasitas pengelolaan data melalui Rumah DataKu merupakan langkah strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based planning*) di tingkat desa.

Menurut (Yustini et al., 2024) dalam tulisannya yang berjudul "Pengelolaan Rumah DataKu Kampung KB Cempaka Sei Jawi: Cerdas Menampilkan Data Kependudukan" program tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan menunjukkan hasil yang positif. Melalui kegiatan pelatihan, para kader Kampung KB Cempaka memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengelolaan data kependudukan. Kemampuan peserta dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data meningkat secara signifikan. Selain itu, pemasangan papan data di lokasi strategis turut memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, sehingga mendorong transparansi dan partisipasi publik. Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian program tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan:

- a). Penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan bagi para kader guna memperdalam kemampuan mereka dalam mengelola dan menyajikan data kependudukan, termasuk data yang bersifat lebih kompleks;
- b). Penguatan kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sebagai upaya mendukung efisiensi pengelolaan data dan memperluas manfaat bagi warga;
- c). Evaluasi berkala terhadap kinerja Rumah DataKu, yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyesuaian program agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan;

- d). Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih maju dalam sistem pengelolaan data dan penyajian informasi, untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas;
- e). Sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai keberadaan, manfaat, dan cara pemanfaatan Rumah DataKu, sebagai upaya meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya data kependudukan.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan program pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola data kependudukan di Kampung KB Cempaka Sungai Jawi, Kalidoni, Palembang.

Menurut (Zulfanetti et al., 2025) dalam tulisannya yang berjudul “Pelatihan Analisis Data Kependudukan bagi Kader Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Batang Hari” bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan menunjukkan respons positif dari para kader Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) seluruh kelurahan di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, yang terlihat dari antusiasme tinggi dalam mengikuti pelatihan analisis dan pemanfaatan data kependudukan untuk penguatan fungsi Rumah Data Kependudukan (Rumah DataKu).

Melalui pelatihan ini, para kader memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, serta keterampilan dalam menganalisis dan mengoptimalkan penggunaan data yang tersedia. Mereka juga mampu menyajikan data secara lebih informatif dan menarik, sehingga dapat digunakan secara efektif dalam mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan kependudukan di tingkat desa. Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi bersama para kader KKB menyampaikan harapan agar kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pencapaian klasifikasi Rumah DataKu paripurna serta mendukung keberlanjutan program Kampung Keluarga Berkualitas di masa mendatang.

2. Pembahasan

Berdasarkan studi literatur dari berbagai wilayah, implementasi Rumah DataKu sebagai pusat data mikro di tingkat desa/kelurahan menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun secara konsep Rumah DataKu sangat strategis dalam mendukung program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius.

- a. Implementasi Rumah DataKu di Kalurahan Tileng Gunungkidul sebagai studi kasus utama

Penelitian Hanifah & Samsuharjo (2024) menunjukkan bahwa implementasi Rumah DataKu di Kalurahan Tileng telah memenuhi empat indikator dalam teori implementasi Edward III, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keberhasilan ini didukung oleh keberadaan dashboard digital “IN_DUK”, pembentukan struktur organisasi yang jelas melalui SK Kalurahan, dan pembaruan data berkala yang ditampilkan secara transparan pada papan data serta platform digital. Komitmen para pelaksana juga tergolong tinggi, dengan tingkat partisipasi yang cukup meskipun belum menyeluruh. Namun demikian, tantangan utama masih ditemukan pada aspek literasi data masyarakat. Sebagian besar warga belum memahami peran Rumah DataKu sebagai pusat informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan lokal.

- b. Perbandingan Implementasi di Daerah Lain

- 1) Sidoarjo: Tantangan Struktural dan Rendahnya Cakupan
Studi di Kabupaten Sidoarjo (Kustanto et al., 2020) menunjukkan bahwa hanya 3 dari 43 Kampung KB yang memiliki Rumah DataKu. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, minimnya SDM terlatih, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Akibatnya, Rumah DataKu belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung perencanaan pembangunan.
 - 2). Mataram: Ketergantungan Eksternal dan Dampak Bencana
Di Kota Mataram, khususnya di Dusun Pengempel dan Geguntur, ketidakberlanjutan program menjadi isu utama. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, gempa 2018 dan pandemi menyebabkan banyak Rumah DataKu tidak aktif. Masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya data, dan merasa hanya dijadikan objek sensus, bukan subjek pembangunan.
 - 3). Salatiga: Model Partisipasi dan Dukungan Akademik
Beberapa lokasi di Salatiga, seperti Tingkir Lor, Blotongan, dan Kauman Kidul, menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan universitas dapat menjadi solusi memperkuat kualitas Rumah DataKu. Melalui program pengabdian masyarakat, telah dilakukan pendampingan dalam bentuk pelatihan input data digital, pembuatan video profil, dan optimalisasi media sosial. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendekatan pemberdayaan berbasis pendidikan.
 - 4). Batang Hari (Jambi): Peningkatan Literasi Data Kader
Di Kabupaten Batang Hari, program pelatihan untuk kader Kampung KB berhasil meningkatkan kemampuan analisis data, termasuk analisis spasial dan deskriptif. Keberhasilan ini menjadi indikasi bahwa keberlanjutan Rumah DataKu sangat ditentukan oleh kapasitas kader, bukan hanya ketersediaan fasilitas.
 - 5). Pandeglang (Banten): Hambatan Akses dan Pendanaan
Kegiatan pendampingan di Desa Pasir Panjang menunjukkan bahwa keterbatasan data, rendahnya kemampuan kader, serta tidak adanya alokasi dana dari desa menjadi hambatan utama. Pengisian aplikasi Rumah DataKu tidak berjalan efektif karena kurangnya pelatihan teknis dan dukungan struktural.
 - 6). Kalidoni (Palembang): Strategi Keberlanjutan
Peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan berdampak signifikan terhadap kemampuan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Keberhasilan ini diperkuat oleh lima rekomendasi strategis: pelatihan berkelanjutan, penguatan kemitraan, evaluasi rutin, pemanfaatan teknologi informasi, dan sosialisasi masyarakat yang berkelanjutan.
- c. Analisis Tematik: Keberlanjutan, Partisipasi, dan Literasi Data
- 1) Keberlanjutan
Tileng dan Kalidoni menunjukkan potensi kuat untuk keberlanjutan karena dukungan kelembagaan, sistematisasi kegiatan, dan pemanfaatan teknologi. Di sisi lain, daerah seperti Sidoarjo, Mataram, dan Pandeglang masih lemah dalam menjaga kesinambungan program.
 - 2) Partisipasi Masyarakat
Salatiga, Kalidoni, dan Batang Hari menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendekatan penguatan kapasitas dan pendampingan sistematis. Sebaliknya, Tileng meskipun berhasil secara kelembagaan, masih menghadapi keterbatasan dalam menjadikan masyarakat sebagai pemilik data.

3). Literasi Data

Hanya sedikit daerah yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek literasi data. Kalidoni dan Batang Hari menjadi contoh positif di mana pelatihan yang berkelanjutan mampu menciptakan kader yang tidak hanya mengelola data, tetapi juga menggunakannya untuk menyusun solusi atas permasalahan lokal. Daerah lain seperti Tileng dan Sidoarjo masih menghadapi hambatan signifikan, meskipun telah tersedia infrastruktur data

d. Sintesis: Gap antara Teori dan Praktik

Model Edward III sangat membantu dalam menjelaskan faktor-faktor teknis implementasi kebijakan. Namun temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan dinamika sosial di lapangan bahwa aspek keberlanjutan dan partisipasi tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh kerangka ini. Dibutuhkan pendekatan tambahan yang menggabungkan teori implementasi dengan perspektif pemberdayaan dan literasi digital agar Rumah DataKu tidak hanya menjadi simbol program, tetapi juga alat transformatif di tingkat desa.

E. PENUTUP

Penelitian ini menganalisis implementasi Rumah DataKu dengan fokus pada kasus Kalurahan Tileng di Kabupaten Gunungkidul dan membandingkannya dengan berbagai literatur dari daerah lain seperti Sidoarjo, Mataram, Salatiga, Batang Hari Jambi, Pandeglang, dan Kalidoni Palembang. Dengan menggunakan kerangka teori implementasi Edward III ditemukan bahwa keberhasilan Rumah DataKu sangat ditentukan oleh sinergi antara faktor teknis dan sosial.

Implementasi Rumah DataKu di Tileng menunjukkan bahwa aspek struktur birokrasi dan disposisi pelaksana telah berjalan dengan baik. Namun, tantangan signifikan masih ditemukan dalam hal partisipasi masyarakat dan literasi data. Dibandingkan dengan daerah lain, Kalidoni dan Batang Hari memperlihatkan praktik baik dalam pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas kader, sementara Salatiga menonjol dari sisi pelibatan akademisi dan kolaborasi lintas sektor. Di sisi lain, Sidoarjo, Mataram, dan Pandeglang mencerminkan tantangan implementasi yang bersumber dari minimnya sumber daya, rendahnya partisipasi warga, dan lemahnya keberlanjutan program.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Rumah DataKu tidak dapat hanya bergantung pada dimensi administratif, melainkan membutuhkan penguatan literasi data, keberlanjutan pelatihan, dan penciptaan ekosistem kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan mitra kerja lainnya. Model implementasi kebijakan Edward III tetap relevan, tetapi perlu dilengkapi dengan pendekatan berbasis pemberdayaan dan kesadaran masyarakat agar Rumah DataKu dapat berfungsi secara transformatif.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

1. Peningkatan Literasi Data Masyarakat

Pemerintah daerah perlu merancang program literasi data secara sistematis bagi warga desa, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pemanfaatan Rumah DataKu, agar masyarakat tidak hanya menjadi obyek pengumpulan data, tetapi juga subyek yang aktif dalam penggunaannya.

2. Pelatihan Kader Berkelanjutan

Pelatihan teknis untuk kader Rumah DataKu tidak cukup dilakukan satu kali. Diperlukan mekanisme pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan

perkembangan teknologi dan kebutuhan lokal, sebagaimana dilakukan di Kalidoni dan Batang Hari.

3. Penguatan Kemitraan Multiaktor

Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mendukung operasionalisasi Rumah DataKu, baik dari sisi pendanaan, inovasi teknologi, maupun penguatan kapasitas kelembagaan.

4. Integrasi Platform Digital dan Data Terbuka

Pemerintah desa perlu mendorong pengembangan sistem data digital yang mudah diakses masyarakat dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Hal ini akan meningkatkan transparansi serta mendorong penggunaan data dalam pengambilan keputusan berbasis bukti.

5. Evaluasi dan Pemantauan Program Secara Periodik

Setiap Rumah DataKu perlu dievaluasi secara berkala dengan indikator yang jelas, mencakup aspek teknis, partisipatif, dan sosial. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar perbaikan dan inovasi program.

6. Replikasi Praktik Baik antar Wilayah

Pemerintah pusat melalui BKKBN dapat menyusun panduan berbasis praktik baik dari daerah seperti Kalidoni, Salatiga, dan Batang Hari, yang kemudian direplikasi dan disesuaikan dalam konteks lokal di wilayah lain yang tertinggal dalam implementasi.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan penulis kepada para dosen program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” atas materi dan pembelajaran yang disampaikan selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyusun jurnal dengan baik. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Seminar Nasional dan Call for Paper Pemerintahan dan Desa Tahun 2025 untuk dedikasi dan jerih payahnya sehingga artikel dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

G. TENTANG PENULIS

Penulis bernama Anjania Rayi Saputri, lahir di Sleman, 1 Januari 1989. Saat ini, penulis merupakan mahasiswa Program Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta. Latar belakang pendidikan S1 penulis adalah Statistika dari Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 2013. Minat utama penulis dalam bidang penelitian mencakup isu-isu kebijakan publik, pemerintahan desa, kependudukan, serta pemberdayaan masyarakat.

Penulis saat ini bekerja di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Perwakilan BKKBN DIY ditempatkan pada Bidang Pengendalian Penduduk yang membawahi kegiatan Perencanaan Pengendalian Penduduk, Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan, dan Analisa Dampak Kependudukan. Kegiatan tersebut diantaranya penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan, pengembangan Rumah Data Kependudukan, penguatan data parameter perencanaan dan evaluasi program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana, penyediaan dan pengelolaan data di Kampung KB, pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan, memperkuat Kerjasama melalui program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan, penguatan Kampung Keluarga Berkualitas, dan penguatan sistem peringatan dini pengendalian penduduk.

Penulis juga telah mengikuti pelatihan nasional mengenai demografi, workshop pembangunan berkelanjutan dan perencanaan berbasis data yang diselenggarakan oleh BKKBN serta mitra kerja lainnya. Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam upaya memperkuat fungsi Rumah DataKu sebagai instrumen penting dalam pembangunan berbasis data di tingkat desa/kelurahan, serta membuka ruang dialog antar pemangku kepentingan untuk mendukung Kampung Keluarga Berkualitas yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allyreza, R., Ardiyanto, R., & Catherine, E. A. (2023). Pendampingan Kader Keluarga Berencana Dalam Pengisian Aplikasi Rumah Dataku Sebagai Upaya Mewujudkan Kampung KB Berkualitas di Desa Pasir Panjang Kabupaten Pandeglang. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 20–29.
- Ari, Y. S., Gari, W. W. T., Mardiyanto, M. D., Jessica, A., Wulandari, N., & Purnomo, D. (2021). Pendampingan Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Dataku dan Informasi Keluarga Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kelurahan Kauman Kidul Salatiga. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 484–498. <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-52-tahun-2009-tentang->
- Baru, B. M., Rusbiyanti, S., & Harianto. (2019). *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Good Governance) Melalui Pengembangan Potensi Modal Sosial*. LaksBang Pressindo.
- BKKBN. (2018). *Panduan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan)*.
- BKKBN. (2020). *Panduan Pengelolaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga*. BKKBN.
- Fuadi, H., Daeng, A., Astuti, E., & Manan, A. (2023). Menuju Kampung Berkualitas (Pendampingan Rumah Dataku Pada Kampung KB di Dusun Geguntur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram). *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(4), 1323–1325. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v6i4.6595>
- Fuady, H. (2020a). Kepengurusan Menentukan Kegiatan (Kasus Pendampingan Rumah Dataku Pada Kampung KB di Dusun Geguntur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram). *Indonesian Journal of Education and Community Services*, 1(2), 51–53.
- Fuady, H. (2020b). Rumah Dataku: Antara Harapan dan Kenyataan di Kampung KB (Kasus Pendampingan Rumah Dataku Pada Kampung KB Di Dusun Pengempel Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram). *Indonesian Journal of Education and Community Services*, 1(2), 48–50.
- Hanifah, I. N., & Samsuharjo. (2024). Implementasi Program Rumah Data Kependudukan Dalam Meningkatkan Pengelolaan Data di Level Mikro. *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 23–34. <http://journal.stia-aan.ac.id/index>
- Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik* (Cetakan Pertama). Penerbit Insan Cendekia Mandiri. www.insancendekiamandiri.co.id
- Kustanto, M., Sholihah, F., & Utami, M. (2020). Tantangan Pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Borneo Akcaya*, 6(1), 58–73.
- Lumendek, D. A., Fadhila, A., Kurniawan, O., Arya, Y., Basuki, J. S., & Purnomo, D. (2021). Pendampingan Masyarakat dalam Meningkatkan UMKM dan Pembinaan Sarana Administrasi

- Rumah Dataku di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) “Melati” Kelurahan Blotongan Kota Salatiga. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 01(03), 460–473.
- Meter, D. S., & Horn, C. E. Van. (1975). The Policy Implementation A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–487.
- Purnomo, D., Raung, S. A., Yonanda, S., Hartono, R., Rizqi, W. A., Puteri, A. N., & Ratulia, A. (2022). Pendampingan dan Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga di Kampung KB Akrab Kelurahan Tingkir Lor Kota Salatiga Tahun 2022. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 170–182.
- Yustini, T., Agustian, E., Purnamasari, E. D., Hanani, A. D., Teknik, F., Keselamatan, S., & Kerja, K. (2024). Pengelolaan Rumah Dataku Kampung KB Cempaka Sei Jawi: Cerdas Menampilkan Data Kependudukan. *Aksi Kepada Masyarakat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 633–642.
- Yustiyanto, R. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jiposster: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan*, 4(1), 88–95. <https://jurnal.polstac.or.id/index.php/jiposster/article/view/22/14>
- Zulfanetti, Heriberta, Parkhurst, H., Mukhzarudfa, Parmadi, & Minati, J. (2025). Pelatihan Analisis Data Kependudukan bagi Kader Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.37567/pkm.v5i1.3348>

Peraturan dan Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga